



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

PERJANJIAN KINERJA

2023



KATA PENGANTAR

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sub kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan, Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri dalam Negeri No. 150-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023. Didharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan.

Tenggarong, Januari 2023

Pdt. Kepala Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kutai Kartanegara


M. Hatta, SE, M.Si
Pembina IV/b

NIP. 196708152000121005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. HATTA, S.E., M.Si.
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. EDI DAMANSYAH, M.Si.
Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang perunggulan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
PIH. KEPALA DINAS



M. HATTA, S.E., M.Si.
Pembina Vic I (IV/b)
NIP. 196708152000121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrana	Dokumen	4
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,30
3	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	18,59
4	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Persentase Pencari Kerja Yang Tendaftar Ditempatkan	Persen	8,39
5	Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi	Persen	100
6	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1

7	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
8	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100
9	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Bertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Bertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
10	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)
11	Pemenuhan Keterediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
12	Membuat inovasi dari/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1

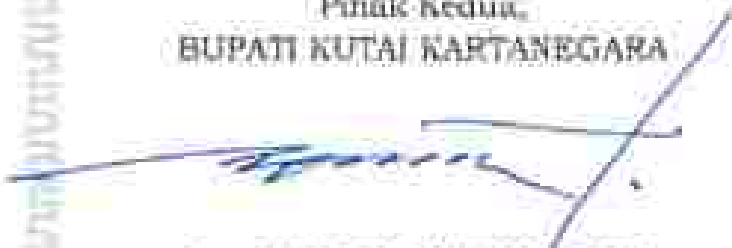
13	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
14	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
15	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
16	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;	Dokumen Revisi Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
17	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK*";	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
18	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
19	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.033.556.643,00	APBD
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	100.000.000,00	APBD
3	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	650.000.000,00	APBD
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	6.151.000.000,00	APBD
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300.000.000,00	APBD
6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.255.000.000,00	APBD
7	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	7.644.704.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		30.134.260.643,00	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Dra. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
Pt: KEPALA DINAS


M. HATTA, S.E., M.Si.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 196708152000121005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. HATTA, SE, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE, M.Si

Jabatan : PIL. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Sekretariat yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Tercapainya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan review awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
PIK KEPALA DINAS

M. HATTA, SE, M.Si
PEMBINA - IV/b
NIP. 19670815/200012 1 005

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

M. HATTA, SE, M.Si
PEMBINA - IV/b
NIP. 19670815/200012 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	5
2	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1
3	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Dokumen	1
4	Meningkatnya Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian dengan Baik	Jumlah Aparatur Sipil Negara	Orang	124
5	Meningkatnya Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	Paket	12
6	Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12
7	Meningkatnya Fasilitas dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	27

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
8	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
9	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
10	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
11	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
12	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Peringkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Peringkat Daerah;	Predikat	B (60-70)

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
13	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterlaksanaan Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
14	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
15	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang.	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
16	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan.	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
17	Melaksanakan Manajemen Risiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
18	Melaksanakan Reviu Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
19	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
20	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
21	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
22	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.102.894.756	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	75.000.000	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	505.000.000	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.700.000	APBD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.044.919.956	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525.041.931	APBD
JUMLAH ANGGARAN		13.033.555.643	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS



M. HATTA, SE, M.Si
PEMBINA - IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
SEKRETARIS



M. HATTA, SE, M.Si
PEMBINA - IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SAIFUL BAHRI, MH

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PEMBERDAYAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE. M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Bidang Pembinaan Pemberdayaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arah Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di Perangkat Daerahnya;
12. Melaksanakan review awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata lola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan, (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pt. KEPALA DINAS

M. HATTA, SE. M.Si
PEMBINA - IV/5

NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

BIDANG PEMBINAAN PEMBERDAYAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Drs. SAIFUL BAHRI
PEMBINA - IV/a
NIP. 19671006 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja yang produktif dan beryaya swng	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang	327
		Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	Lembaga	11
		Jumlah perusahaan kecil yang produktif	Perusahaan	25
2	Meningkatnya Penempatan tenaga kerja sesuai Informasi kebutuhan Pasar Kerja dan wirausahawan baru	Jumlah Layanan Aritar Kerja	Layanan	70
		Jumlah informasi pasar kerja	Event	1
		Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	Dokumen	1
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
4	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
5	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
6	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
8	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
9	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
10	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
11	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
12	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
13	Melaksanakan Review Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Review Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
14	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
15	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
16	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
17	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	6.051.000.000	APBD
2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50.000.000	APBD
3.	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	50.000.000	APBD
4.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.155.000.000	APBD
5.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100.000.000	APBD
6.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		8.506.000.000	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023.

Pihak Kedua:

PIL. KEPALA DINAS



M. HATTA, SE. M.Si

PEMBINA - IV/b

NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama:

BIDANG PEMBINAAN PEMBERDAYAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KEEMPATAN KERJA



Drs. SAIFUL BAHRI

PEMBINA - IV/a

NIP. 19671006 200012 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SYUKUR EKO BUDI SANTOSO
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL,
SYARAT-SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE, M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di Perangkat Daerahnya;
12. Melaksanakan review awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

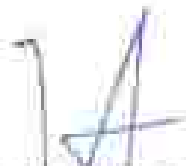
1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

PIL. KEPALA DINAS



M. HATTA, SE, M.Si
PEMBINA - IV/b

NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL, SYARAT-SYARAT KERJA DAN
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA



Drs. SYUKUR EKO BUDI SANTOSO
PEMBINA - IV/a

NIP. 19680907 199902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEgara

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya hubungan Industrial yang harmonis dan Dinamis	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan	Perusahaan	28
		Jumlah Fasilitas Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	Perusahaan	60
2.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
3.	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
4.	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil, tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
5	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
7	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
8	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penguatan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
10	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
11	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
12	Melaksanakan Reviu Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
13	Mejaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
15	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
16	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	APBD
2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	7.394.704.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		7.644.704.000	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

PIH. KEPALA DINAS



M. HATTA, SE, M.Si

PEMBINA – IV/b

NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL, SYARAT-SYARAT KERJA DAN
JAMINAN SOSIAL-TENAGA KERJA



Drs. SYUKUR EKO BUDI SANTOSO

PEMBINA – IV/a

NIP. 19680907 199902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LUKMAN, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN, PEMBANGUNAN
DESA & PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE, M.Si

Jabatan : PL. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Bidang Penyiapan Kawasan, Pembangunan Desa dan Permukiman Transmigrasi yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di Perangkat Daerahnya;
12. Melaksanakan review awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

PIL KEPALA DIRAS

M. HATTA, SE, M.Si

PEMBINA - IV/b

NIP. 19670815 200012 1 003

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENYIAPAN
KAWASAN, PEMBANGUNAN DESA
DAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

LUKMAN, S.Sos, M.Si

PEMBINA - IV/a

NIP. 19720516 200801 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEgara

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan transmigrasi baru	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa / Kimtrans	Dokumen	3
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut	Jumlah	1
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
4	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewajiban Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
5	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
7	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
8	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
10	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
11	Melaksanakan Manajemen Risiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
12	Melaksanakan Reviu Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
13	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
15	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
16	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEgara**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
I.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	650.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		650.000.000	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

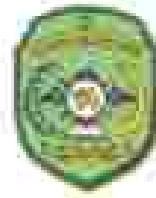
PIL. KEPALA DINAS

M. HATTA, SE, M.Si
PEMBINA - IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENYIAPAN
KAWASAN, PEMBANGUNAN DESA
DAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

LUKMAN, S.Sos, M.Si
PEMBINA - IV/a
NIP. 19720516 200801 1 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA WARDANA, AP., MM.

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESA & KAWASAN
TRANSMIGRASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE, M.Si

Jabatan : PIC KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Bidang Pengembangan Desa dan Kawasan Transmigrasi yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di Perangkat Daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini,
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

PIL. KEPALA DINAS

M. HATTA, SE, M.Si

PEMBINA - IV/b

NIP. 19670815-200012-1-005

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESA & KAWASAN TRANSMIGRASI

HENDRA WARDANA, AP, MM

PEMBINA - IV/a

NIP. 19760218-199603-1-002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan kawasan Transmigrasi baru	Jumlah Kawasan Desa/Kimtrak yang Dikembangkan	Kawasan	1
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
4	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
5	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
7	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
8	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
9	Tercapainya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
10	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100

No.	SABARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
11	Melaksanakan Manajemen Risiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko. Maksimal 10 Januari	Laporan	2
12	Melaksanakan Reviu Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
13	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
15	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
16	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasa Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

**KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
I.	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian	300.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		300.000.000	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
PI. KEPALA DINAS



M. HATTA SE. M.Si
PEMBINA - IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESA & KAWASAN TRANSMIGRASI



HENDRA WARDANA AP. MM
PEMBINA - IV/a
NIP. 19760218 199603 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARIANI, S.Sos

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KETATALAKSANAAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan review awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



M. HATTA SE, M Si
PEMUDA - IV/b
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KETATALAKSANAAN



MARIANI, S. Sos
PENATA Tk I - III/d
NIP. 19710724 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KADUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksanainya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1
4	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Paket	1
5	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	1
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	4
7	Tersedianya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	Paket	1
8	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1
9	Terlaksanainya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
10	Terlaksanainya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
11	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12
12	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12

No.	BASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Kantor		
13	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	24
14	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1
15	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2
16	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
17	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
18	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
19	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
20	Melaksanakan Tata Kelola	Predikat Tata Kelola	Predikat	B (60-70)

No.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
	Araip Perangkat Daerah;	Araip Perangkat Daerah;		
21	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterimaan Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
22	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
23	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
24	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
25	Melaksanakan Manajemen Risiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
26	Melaksanakan Review Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Review Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
27	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
28	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
29	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan	Persen	100

No.	BASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;		
30	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasa Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000	APBD
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.700.000	APBD
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	APBD
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	APBD
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	APBD
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	APBD
7.	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	APBD
8.	Facilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	APBD
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	APBD
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	APBD
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000	APBD
12.	Penyediaan Jasa Peralatan	69.867.000	APBD

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
	dan Perlengkapan Kantor		
13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	671.052.956	APBD
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	276.041.931	APBD
15.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000	APBD
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		2.175.661.887	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

SEKRETARIS


M. HATTA, SE, M.Si
 PEMERINTAH – IV/b
 NIP. 196708 1 200012 1 005

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KETATALAKSANAAN


MARIANI, S.Sos
 PENATA Tk I – III/d
 NIP. 19710724 199303 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. ERNAWATI, SE

Jabatan : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HATTA, SE, M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Jabatan yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan review awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE, M.Si
PEMUDA - IV/d
NIP. 19670815 200012 1 005

Pihak Pertama,
ANALISI SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR


Hj. ERNAWATI SE
PENATA Tk I - III/d
NIP. 19710724 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tertelaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1
2	Tertelaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10
3	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	83
4	Tertelaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10
5	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut	Jumlah	1
6	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
7	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BATUAN	TARGET
8	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
9	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
10	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukor dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
11	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
12	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
13	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
14	Melaksanakan Manajemen Risiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
15	Melaksanakan Review Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Review Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
16	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
17	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
18	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
19	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000	APBD
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000	
3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	
4.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55.000.000	
JUMLAH ANGGARAN		505.000.000	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
PIH. KEPALA DINAS


M. HATTA, SE, M.Si
PEMBINA - IV/b
NIP. 19670815/200012 1 005

Pihak Pertama,
ANALISI SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR


Hj. ERNAWATI, SE
PENATA Tk I - III/d
NIP. 19710724 199303 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS ISNANTO, S.Sos

Jabatan : PENGANTAR KERJA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. SAIFUL BAHRI, M.H

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PEMBERDAYAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama, berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada jabatan yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
3. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Melaksanakan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	30
2	Melaksanakan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	5
3	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
4	Tertaksananya sosialisasi tenaga kerja mikro	Jumlah sosialisasi tenaga kerja mikro	laporan	2
5	Tertaksananya memberikan materi penyuluhan jabatan kepada lembaga pendidikan	Jumlah memberikan materi penyuluhan jabatan kepada lembaga pendidikan	laporan	2
6	Tertaksananya konsultasi kepada pencaker	Jumlah konsultasi kepada pencaker	laporan	20
7	Tertaksananya penempatan tenaga kerja tingkat pendidikan strata 1 s.d strata III	Jumlah penempatan tenaga kerja tingkat pendidikan strata 1 s.d strata III	laporan	2
8	Tertaksananya seminar/ lokakarya sebagai peserta	Jumlah mengikuti seminar/ lokakarya sebagai peserta	sertifikat	1
9	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasa Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Persen	100

4. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PEMBERDAYAAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA



Drs. SAIFUL BAHRI, M.H
PEMBINA - IV/a
NIP. 19671006 200012 1 002

Pihak Pertama,
PENGANTAR KERJA AHLI MUDA



AGUS ISNANTO, S.Sos
PENATA - III/c
NIP. 19690811 200112 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUNARTO, SP

Jabatan : INSTRUKTUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. SAIFUL BAHRI, M.H

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PEMBERDAYAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada jabatan yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PEMBERDAYAAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA



Drs. SAIFUL BAHRI, M.H
PEMBINA - IV/a
NIP. 19671006 200012 1 002

Pihak Pertama,

INSTRUKTUR



MUNARTO, SP
PENATA TK. I - III/d
NIP. 19671203 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Bertbasis Kompetensi	Orang	327
2	Melaksanakan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Lembaga	20
3	Melaksanakan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	150
4	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	11
5	Terwujudnya Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	25
6	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut	Jumlah	1
7	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Daerah;		
8	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
9	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
10	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
11	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kulkar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
12	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
13	Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
14	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
15	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian	Laporan	2

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Kegiatan di Perangkat Daerah:	Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari		
16	Melaksanakan Review Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Review Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
17	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penerapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
18	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
19	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.	5.500.000.000	APBD
2.	Koordinasi lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	50.000.000	APBD
3.	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota	501.000.000	APBD
4.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	30.000.000	APBD
5.	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	50.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		6.151.000.000	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PEMBERDAYAAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

Drs. SAIFUL BARRI, M.H
PEMERSA - IV/a
NIP. 19671006-200012 1 002

Pihak Pertama,
INSTRUKTUR

MUNARTO, SP
PENATA TK. I - III/d
NIP. 19671203 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. LESTA NUGROHO

Jabatan : PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LUKMAN, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG PENYIAPAN KAWASAN, PEMBANGUNAN DESA, DAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Jabatan yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Memimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan review awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kotai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan, (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PENYIAPAN
KAWASAN, PEMBANGUNAN DESA,
DAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI


LUKMAN, S.Sos, M.Si

PEMBINA - IV/a

NIP. 19720516 200801 1 016

Pihak Pertama,

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT



Drs. LESTA NUGROHO

PENATA TK I - III/d

NIP. 19670505 199403 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BATUAN	TARGET
1	Melaksanakan Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan	1
2	Melaksanakan Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	2
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektori Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektori Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
4	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
5	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
6	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	(LHKASN);			
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
8	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
9	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Pemangulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
10	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Uang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
11	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
12	Melaksanakan Manajemen Risiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
13	Melaksanakan Review Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Review Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
14	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100
15	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 1 JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
16	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
17	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	150.000.000	APBD
2.	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	500.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		650.000.000	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Phak Kedua,
KEPALA BIDANG PENYIAPAN
KAWASAN, PEMBANGUNAN DESA,
DAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI


LUKMAN, S.Sos, M.Si
PEMBINA - IV/a
NIP. 19720516 200801 1 016

Phak Pertama,
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT


Dra. LESTA NUGROHO
PENATA TK I - III/d
NIP. 19670305 199403 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SRI PLAHESTI, S.Pd

Jabatan : PENGOERAK SWADAYA MASYARAKAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDRA WARDANA, AP, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESA DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

Selaku idasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Jabatan yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang peranggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESA DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI



HENDRA WARDANA, AP, MM
PEMBINA - IV/a
NIP. 19760218 199603 1 002

Pihak Pertama,
PENGGERAK SWADAYA
MASYARAKAT



SRI FLARESTI, S.Pd
PEMBINA - IV/a
NIP. 19671001 199303 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terciptanya Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga (KK)	30
2	Mewujudkan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Ditembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	15
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
4	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
5	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
6	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Peritanggal 31 Maret 2023	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
15	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
16	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
17	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	100.000.000	APBD
2.	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	200.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		300.000.000	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESA DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI**


HENDRA WARDANA, AP, MM
PEMBINA - IV/a
NIP. 19760218 199603 1 002

Pihak Pertama,
**PENGERAK SWADAYA
MASYARAKAT**


SRI PLAHESTI, S.Pd
PEMBINA - IV/a
NIP. 19671001 199303 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDI FAHRIZA, SP

Jabatan : PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HENDRA WARDANA, AP, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESA DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Jabatan yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan review awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESA DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI


HENDRA WARDANA, AP. MM
PEMBINA - IV/a
NIP. 19760218 199603 1 002

Pihak Pertama,
PENGOERAK SWADAYA
MASYARAKAT


YUDI FAHRIZA, SP
PENATA TK I - III/d
NIP. 19780603 200112 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terciptanya Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga (KK)	30
2	Mewujudkan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	15
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (HPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
4	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
5	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
6	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Aparatur Sipil Negara (LIKASN);			
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
8	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Sukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
9	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
10	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
11	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
12	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
13	Melaksanakan Review Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Review Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
14	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
15	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
16	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
17	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

**SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

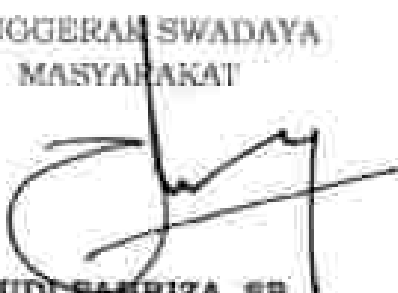
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	100.000.000	APBD
2.	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	200.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		300.000.000	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
DESA DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI


HENDRA WARDANA, AP, MM
PEMBINA - IV/a
NIP. 19760218 199603 1 002

Pihak Pertama,
PENGGERAN SWADAYA
MASYARAKAT


YUDI FARRIZA, SP
PENATA TK I - III/d
NIP. 19780603 200112 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESAK NYOMAN ARDANINGSIH, SH, MH

Jabatan : MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DR. SYUKUR EKO BUDI SANTOSO

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL,
SYARAT-SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Jabatan yang saya pimpin;
2. Menyusun dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Tercapainya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan review awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT-
SYARAT KERJA DAN JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA



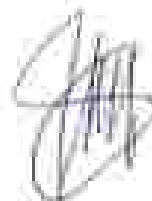
Drs. SYUKUR EKO BUDI SANTOSO

PEMBINA - IV/a

NIP. 19680907 199902 1 001

Pihak Pertama,

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL



DESAK NYOMAN ARDANINGSIH, SH, MH

PENATA TK I - III/d

NIP. 19740515 200112 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	20
2	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PT/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	2
3	Melaksanakan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	15
4	Melaksanakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	100
5	Terselenggaranya Penyelenggaraan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat	Asosiasi	6

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Pekerja yang Diverifikasi		
6	Terlaksanainya Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	20
7	Terlaksanainya Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Terlaksanainya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	35.440
8	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
9	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
10	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Berwung, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
11	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Hutan	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Kelayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Maret 2023 Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
12	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
13	Pemenuhan Keterbedaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
14	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
15	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
16	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
17	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
18	Melaksanakan Review Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Review Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
19	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Kerja		
20	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
21	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
22	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	100.000.000	APBD
2.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	150.000.000	APBD
3.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	APBD
4.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	APBD
5.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non-affiliasi	50.000.000	APBD
6.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	APBD
7.	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	7.194.704.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		7.644.704.000	

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT-
SYARAT KERJA DAN JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA



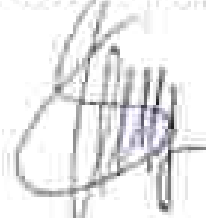
Drs. SYUKUR EKO BUDI SANTOSO

PEMBINA - IV/d

NIP. 19680607 199902 1 001

Pihak Pertama,

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL



DESAK NYOMAN ARDANINGSIH, SH, MH

PENATA TK I - III/d

NIP. 19740515 200112 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRMAN HIDAYAT, S.Sos

Jabatan : MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. SYUKUR EKO HUDI SANTOSO

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL,
SYARAT-SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Jabatan yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (HPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Tercapainya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Uang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan review awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Pengusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Phak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Phak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Phak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT-
SYARAT KERJA DAN JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA



Drs. SYUKUR EKO BUDI SANTOSO
PEMBINA - IV/a
NIP. 19680907 199902 1 001

Phak Pertama,

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL



FIRMAN HIDAYAT, S.Sos
PENATA BUDA TK1 - III/b
NIP. 19750604 200701 1 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	20
2	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	2
3	Melaksanakan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	15
4	Melaksanakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	100
5	Terselenggaranya Penyelenggaraan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat	Asosiasi	6

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Pekerja yang Diverifikasi		
6	Terlaksananya Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	20
7	Terlaksananya Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	35.440
8	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
9	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
10	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
11	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Kelayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Maret 2023 Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
12	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
13	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
14	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
15	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
16	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
17	Melaksanakan Manajemen Risiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
18	Melaksanakan Reviu Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
19	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Kerja		
20	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 1JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
21	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
22	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT-
SYARAT KERJA DAN JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA



Dra. SYUKUR EKO BUDI SANTOSO
PEMBINA - IV/a
NIP. 19680907 199902 1 001

Pihak Pertama,

MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL



FIRMANS HIDAYAT, S.Sos
PENATA MUDA TK I - III/b
NIP. 19750604 200701 1 029



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARIYANSA, SE

Jabatan : MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. SYUKUR EKO BUDI SANTOSO

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL,
SYARAT-SYARAT KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA

Selain atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam rencana Kerja (RENJA), serta dalam rangka mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Jabatan yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Penggunaan Barang Milik Daerah;

4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Asset Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan review awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
16. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT-
SYARAT KERJA DAN JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA

Dra. SYUKUR EKO BUDI SANTOSO

PEMERNA - IV/a

NIP. 19680907 199902 1 001

Pihak Pertama,

MEDIATOR HUBUNGAN
INDUSTRIAL

HARIYANSA, SE

PENATA TK I - III/d

NIP. 19740818 200012 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tertakutannya Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	20
2	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	2
3	Melaksanakan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	15
4	Melaksanakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terealisasi	Perkara	100
5	Terselenggaranya Penyelenggaraan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat	Asosiasi	6

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Pekerja yang Diverifikasi		
6	Terlaksananya Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	20
7	Terlaksananya Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	35.440
8	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	1
9	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;	Persen	100
10	Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangan Secara Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transparan, Adil tidak diskriminatif dan Akuntabel;	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
11	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);	Maret 2023 Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
12	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;	Predikat	B (60-70)
13	Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
14	Membuat Inovasi dan atau diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah;	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
15	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Uang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
16	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan;	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Keuangan	Persen	100
17	Melaksanakan Manajemen Risiko Terhadap Program Kegiatan di Perangkat Daerah;	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2
18	Melaksanakan Reviu Awal Terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai dengan Data Terkini;	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
19	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya	Persen	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Kerja		
20	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal JP Per Tahun;	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
21	Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;	Persen	100
22	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pengresahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	100.000.000	APBD
2.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	150.000.000	APBD
3.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	APBD
4.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	APBD
5.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	50.000.000	APBD
6.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	APBD
7.	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja	7.194.704.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		7.644.704.000	

Kudat Kartanegara, 31 Januari 2023

Phak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL, SYARAT-
SYARAT KERJA DAN JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA



Dra. SYUKUR EKO BUDI SANTOSO
PEMBINA - IV/a
NIP. 19680907 199902 1 001

Phak Pertama,

MEDIATOR HUBUNGAN
INDUSTRIAL



HARIYANSA, SE
PENATA TK I - III/d
NIP. 19740818 200012 1 006



PENUTUP

Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 7 (Tujuh) Program dan 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2023 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 30.134.260.643,-

Sehubungan dengan telah tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK) ini, apabila dalam periode pelaksanaan Perjanjian Kinerja ini tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Tenggarong, Januari 2023

Pt. Kepala Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja

M. Hatta, SE, M.Si

Pembina - IV/b

NIP. 19670815 200012 1 005

